

TRANSFORMASI KEKUASAAN DAN KESETARAAN DALAM SISTEM KASTA HINDU BALI (Studi Kasus Di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang)

Ni Luh Suparni Asih¹, Jawatir Pardosi², Moh. Bahzar³, Asnar⁴

niluhh.03@gmail.com¹, pardo_si@yahoo.com², m.bahzar130363@gmail.com³,
asnar3101@gmail.com⁴

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kerta Buana mengenai sistem kasta. Kemudian mendeskripsikan bagaimana transformasi kekuasaan dalam sistem kasta Hindu Bali mempengaruhi struktur sosial masyarakat Desa Kerta Buana, serta mendeskripsikan bagaimana kesetaraan sosial antar kasta dalam sistem kasta Hindu Bali di Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang pada bulan Maret 2025-Mei 2025. Subjek penelitian ini ialah Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Desa Kerta Buana, dan perwakilan masyarakat dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Hindu Bali di desa Kerta Buana memahami bahwa sistem kasta telah mengalami transformasi dari konsep asli Catur Warna dalam ajaran Hindu yang lebih menekankan pada pembagian fungsi atau peran dalam masyarakat, bukan berdasarkan kelahiran atau pewarisan golongan. Kemudian, di Desa Kerta Buana telah mengalami transformasi kekuasaan dalam sistem kasta Hindu Bali yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Dalam aspek upacara keagamaan, pemilihan pemimpin kini lebih mengedepankan kemampuan dan dedikasi, sementara dalam pernikahan, masyarakat semakin menerima pernikahan lintas kasta dengan menitikberatkan pada keharmonisan keluarga. Di bidang jabatan dan pekerjaan, kesempatan terbuka bagi siapa saja yang kompeten tanpa diskriminasi kasta. Meskipun kontroversi dan tantangan sistem kasta masih ada, transformasi menuju kesetaraan sosial telah berjalan dengan baik, terutama melalui akses pendidikan dan peluang kerja yang merata. Stratifikasi sosial dalam sistem kasta tidak lagi menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi

Kata Kunci: Transformasi, Kekuasaan, Kesetaraan, Sistem Kasta, Hindu Bali.

ABSTRACT

This research aims to describe the understanding of the Kerta Buana Village community regarding the caste system. It then describes how the transformation of power within the Balinese Hindu caste system affects the social structure of the Kerta Buana Village community, as well as how social equality among castes within the Balinese Hindu caste system in Kerta Buana Village, Tenggarong Seberang District, is perceived. The type of research is descriptive qualitative. The research was conducted in Kerta Buana Village, Tenggarong Seberang District, from March 2025 to May 2025. The subjects of this research are the Chairman of the Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) in Kerta Buana Village, and representatives of the community from the Brahmana, Ksatria, Waisya, and Sudra castes using observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and data conclusion. The research results show that the Hindu community in Kerta Buana village understands that the caste system has undergone a transformation from the original Catur Warna concept in Hindu teachings, which emphasizes the division of functions or roles in society, rather than being based on birth or hereditary status. Furthermore, Kerta Buana village has experienced a transformation of power within the Hindu Balinese caste system, bringing significant changes to the social structure of the

community. In the aspect of religious ceremonies, the selection of leaders now prioritizes ability and dedication, while in marriage, the community increasingly accepts inter-caste marriages with an emphasis on family harmony. In the field of positions and jobs, opportunities are open to anyone who is competent without caste discrimination. Although controversies and challenges of the caste system still exist, the transformation towards social equality has been progressing well, especially through equal access to education and job opportunities. Social stratification within the caste system is no longer the main obstacle for society to develop and participate equally in social and economic life

Keywords: Transformation, Power, Equa Lity, Caste System, Balinese Hindu.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh beragam suku, budaya, dan bahasa (Farhaeni & Martini, 2023). Salah satu warisan budaya yang paling signifikan di Indonesia adalah agama Hindu, yang mulai diperkenalkan sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Agama ini masuk ke Indonesia melalui interaksi dengan pedagang dan pendeta dari India, yang membawa serta pengaruh budaya dan sistem kepercayaan baru. Seiring dengan perkembangan zaman, agama Hindu menjadi agama mayoritas di Bali, praktik keagamaan Hindu tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan spiritual tetapi juga berintegrasi dengan berbagai aspek sosial dan budaya, menciptakan identitas unik yang membedakan masyarakat Bali dari daerah lainnya di Indonesia (Fahrurrozhi & Kurnia, 2024).

Bali dikenal dengan provinsi yang masyarakatnya penuh dengan budaya dan tradisi yang kuat, khususnya dalam konteks Hindu. Keyakinan masyarakat Hindu Bali terus mempertahankan budaya dan tradisi dengan cara mengaplikasikannya melalui aktifitas kebudayaan sebagai ciri khas masyarakat Hindu Bali merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dan kebudayaan (Desky, 2022). Salah satu aspek penting dalam budaya Hindu Bali adalah sistem kasta merupakan sebuah tatanan sosial yang membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kelahiran, pekerjaan, dan tanggung jawab. Dalam konteks Hindu Bali, sistem ini terdiri dari empat kasta utama: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Setiap kasta memiliki peran dan status sosial yang berbeda, yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial hingga akses terhadap sumber daya dan kekuasaan.

Pada awalnya, sistem kasta di Bali mencerminkan sistem kasta yang terdapat di India, yang terdiri dari empat kasta utama: Brahmana (pendeta), Ksatria (prajurit), Waisya (pedagang dan petani), dan Sudra (pekerja kasar). Setiap kasta memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam masyarakat, dengan Brahmana menempati posisi tertinggi dalam hierarki sebagai pendeta dan penjaga tradisi keagamaan, sedangkan Sudra berada di posisi terendah sebagai pekerja kasar. Dalam kehidupan komunitas masyarakat Bali masa lalu, berbeda hak antara kasta yang satu dengan yang lain juga jelas kelihatan. Untuk menyebutkan beberapa contoh, misalnya hak untuk menjadi pedanda (pendeta Hindu) adalah hanya dilingkungan kasta Brahmana, kemudian hak untuk memegang pemerintahan misalnya sebagai raja adalah dilingkungan kasta ksatria. Dalam kaitannya dengan hak seperti itu sering pula tercakup sejumlah hak yang bersifat ekonomi, sosial, keagamaan dan politik (Galuh Pitaloka et al., 2024).

Konsep kasta di masa lalu, yang melekat pada hak dan kewajiban seperti yang telah disebutkan, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kelancaran fungsi dan perkembangan eksistensi masyarakat tersebut (Masari et al., 2023). Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, dimana masyarakat hindu mulai paham dengan ilmu pengetahuan maupun agama, banyak terjadi pertentangan tentang keberadaan kasta. Dimana sebagian umat berpendapat bahwa kasta

merupakan kesalah pahaman budaya dalam agama hindu. Dalam kitab suci veda tidak dijelaskan tentang keberadaan kasta melainkan warna, yakni menyangkut profesi seseorang.

Meskipun Bali dikenal sebagai pusat kebudayaan Hindu di Indonesia, pengaruh agama ini juga meluas ke daerah lain, termasuk pulau-pulau di luar Bali. Proses transmigrasi masyarakat Bali ke berbagai wilayah diantaranya adalah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Salah satu daerah tempat masyarakat suku Bali berimigrasi yaitu Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki karakteristik budaya Hindu yang kuat (Asih et al., 2023).

Desa Kerta Buana ini merupakan wilayah yang awalnya berupa hutan dan rawa belum berpenghuni secara permanen sebelum dibuka sebagai lokasi transmigrasi pada tahun 1980-an. Wilayah ini secara historis termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Kutai Kartanegara, salah satu kerajaan tertua di Indonesia sejak abad ke-13, namun Desa Kerta Buana baru berkembang sebagai permukiman setelah kedatangan para transmigran, khususnya masyarakat Bali, yang membawa serta tradisi, budaya, dan sistem sosial Hindu Bali. Kehadiran masyarakat Bali dan kelompok transmigran lain seperti Sasak, Jawa, Bugis, serta penduduk lokal seperti suku Kutai dan Dayak, membentuk komunitas baru yang beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya di Kalimantan Timur. Proses transmigrasi ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Bali dan membuka lahan baru bagi pembangunan sosial-ekonomi di wilayah yang lebih luas.

Warga transmigrasi dari Bali adalah yang pertama kali menempati kawasan Desa Kerta Buana pada tahun 1980 tepatnya pada Oktober 1980 silam. Saat itu, sebanyak 400 kepala keluarga asal Provinsi Bali bermigrasi dan bermukim di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dahulunya desa ini dinamakan Lokasi 4 (L4). Namun, kini pemukiman tersebut secara formal dinamai Desa Kerta Buana. Desa Kerta Buana merupakan desa yang hampir sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu.

Transformasi merupakan sebuah perubahan yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam konteks budaya, transformasi dapat terjadi seiring dengan perkembangan serta pergeseran zaman yang mempengaruhi manusia sebagai penghasil budaya, terdapat indikasi adanya transformasi dalam sistem kasta di Desa Kerta Buana. Berdasarkan pengamatan observasi, masyarakat di desa mulai menunjukkan peran yang lebih aktif dari berbagai kasta dan memiliki akses serta peluang lebih yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pendidikan, ekonomi, dan partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan (Alit Septiari & Widya Dhammayanti, 2023).

Desa Kerta Buana menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti karena merupakan komunitas transmigran dari Bali yang berinteraksi dengan masyarakat lokal. Kesetaraan sosial menjadi isu penting dalam konteks ini. Masyarakat Hindu Bali kini semakin menekankan pada nilai-nilai kesetaraan dan kerja sama, meskipun sistem kasta masih memiliki tempat dalam konteks upacara adat. Perubahan nilai-nilai ini berdampak pada hubungan antar kasta dan bagaimana anggota kasta sudra mulai untuk mengambil peluang lebih dan mengatasi stigma sosial. Dengan memahami transformasi sistem kasta di Desa Kerta Buana, kita dapat melihat bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap mempertahankan identitas budaya mereka. Penelitian ini juga relevan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung kesetaraan sosial di tengah keberadaan sistem kasta.

Penelitian ini diperkuat oleh adanya penelitian-penelitian terdahulu, seperti dalam penelitian Sihombing, 2022, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat Bali masih merasakan pengaruh sistem kasta, terutama saat mengikuti kegiatan keagamaan. Kasta dianggap

sebagai status sosial yang dapat menghambat kemajuan individu, dan pengaruh ini diperkuat oleh para pemimpin masyarakat yang mematuhi tradisi yang diwariskan. Kemudian juga dalam penelitian Masari, 2023, menunjukkan bahwa meskipun sistem kasta di Indonesia lebih fleksibel dibandingkan dengan di India, sistem ini tetap mempengaruhi struktur sosial dan mobilitas masyarakat. Catur Varna mengatur peran sosial berdasarkan kasta, mulai dari Brahmana hingga Sudra, dan meskipun tidak seketat di India, sistem ini masih membatasi akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, terutama bagi kasta Sudra yang berada di posisi terbawah.

Studi ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana transformasi kekuasaan dan kesetaraan dalam sistem kasta Hindu Bali dapat terjadi, serta implikasinya bagi hubungan sosial di komunitas lokal. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai budaya Hindu Bali dengan penelitian yang berjudul “Transformasi Kekuasaan dan Kesetaraan dalam Sistem Kasta Hindu Bali (Studi Kasus di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang)”.

METODOLOGI

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang ideal untuk menggali fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh, terutama dalam memahami perilaku manusia dan motivasi di baliknya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap suatu fenomena. Dengan mengamati secara langsung dan partisipatif, peneliti kualitatif berusaha untuk memahami secara mendalam apa yang terjadi di balik permukaan suatu gejala sosial. Pendekatan induktif yang digunakan memungkinkan peneliti untuk membangun teori dan pemahaman yang lebih kaya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan (Nursapiyah, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, studi kasus merupakan metode yang paling tepat untuk menggali secara mendalam dan menyeluruh mengenai individu, kelompok, atau peristiwa dalam konteksnya yang sebenarnya. Dengan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang suatu fenomena, mulai dari latar belakang hingga interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung dan mendetail bagaimana suatu kasus beroperasi dalam situasi nyata, sehingga menghasilkan gambaran yang kaya dan informatif (Fattah Nasution, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa

Pada awalnya, sebelum tahun 1980, kawasan Lokasi 4 (L4) atau Kerta Buana merupakan sebuah areal kosong yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini direncanakan sebagai proyek unit pemukiman transmigrasi oleh pemerintah dalam program transmigrasi umum, swakarsa, dan lokal. Lokasi itu diupayakan sebagai lokasi yang dapat dipergunakan sebagai lahan sektor pertanian dan peningkatan sumber ekonomi masyarakat setempat. Apalagi, saat itu, penduduk di Kalimantan Timur masih jarang, sehingga dalam pengembangannya, perlu didatangkan transmigrasi umum dari luar Pulau Kalimantan, dan semua biaya yang timbul dari kegiatan transmigrasi umum ini dibiayai oleh pemerintah.

Pada tahun 1980, sekitar 2.000 KK atau 8.375 jiwa ditempatkan di salah satu lokasi, yaitu Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai (kini, Kabupaten Kutai Kartanegara). Sebagai Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), di wilayah ini terdapat

4 satuan pemukiman yang disebut L1, L2, L3, dan L4. Sebelum tahun 1980, Kawasan Lokal 4 (L4) atau Kerta Buana merupakan area kosong yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah sudah merencanakan pembangunan bagi transmigrasi. Penempatan transmigrasi dilakukan secara bertahap, tahap pertama sekitar bulan September 1980, tahap kedua pada bulan November 1980. Para transmigrasi berasal dari beberapa wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa penduduk lokal seperti Kutai. Setelah pendataan transmigrasi, peserta yang akan berangkat dari Provinsi Bali berasal dari wilayah Jembrana, Klungkung, Nusa Penida, Badung, Karang Asem, dan Mengwui. Kebanyakan dari mereka adalah petani. Proses kedatangan mereka secara bertahap dan menggunakan transportasi yang berbeda, tahap pertama berjumlah sekitar 250 KK, berangkat dari Bali menggunakan pesawat AURI yang dulu disebut pesawat Hercules. Setibanya di lokasi mereka didata Kembali dan dipanggil untuk mencabut nomor undian di blok mana mereka tinggal. Sewaktu pertama kali datang dan tinggal di L4, merupakan masa masa sulit mereka dituntut untuk sabar, bekerja keras, dan bersemangat.

Tahap kedua, tiga bulan kemudian, bulan November 1980 sekitar 200 KK transmigrasi dari NTB akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, selama 2 hari 2 malam ke Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Samarinda, dekat Pasar Pagi Samarinda. Selanjutnya mereka ke lokasi menggunakan bus dan truk, setibanya di Teluk Dalam, rombongan ditampung di kantor desa dan masjid. Keesokan harinya kepala UPT I Nyoman Ramiya dan petugas membagikan nomor undian untuk mendapatkan rumah.

Pada tahun 1990, dilakukan perbaikan administrasi dari L4 menjadi desa secara definitif dalam wilayah Kecamatan Tenggarong. Setelah masa persiapan, di L4 harus mempunyai kepala desa sementara. Sewaktu itu, ada 2 nama yang diusulkan, yaitu I Dewa Ketut Alit (dari kelompok Bali Barat) dan I Wayan Santika (kelompok Bali Timur). Secara sah, mereka memilih nama I Dewa Ketut Alit untuk menjadi kepala desa pertama, masa jabatan 6 tahun (1992-1997). Pada masanya, L4 ditetapkan menjadi Desa Kerta Buana.

Kerta Buana adalah nama desa yang diberikan dari hasil kesepakatan sesepuh dan warga desa, yang didukung oleh warga yang saat itu mayoritas suku Bali. Menurut beberapa informan, nama Kerta Buana erat kaitannya dengan pengalaman yang dialami oleh masyarakat L4. Desa Kerta Buana berasal dari bahasa sanskerta yakni kerta dan buana, Kerta berarti sejahtera, sedangkan Buana bermakna alam atau hutan. Jadi, saat transmigran datang, daerah itu sangat sepi dan binatang hutan pun masih banyak. Hutannya lebat, dan pepohonannya tinggi. Namun, dengan keadaan yang berat dan penuh tantangan, serta adanya kerja keras untuk mengolah lahan, maka akhirnya tanah memberikan sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi mereka (Kerta Buana, 2018).

Letak Geografis

Penelitian yang penulis laksanakan terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, ibu kotanya berada di Kecamatan Tenggarong Seberang, yang berbatasan dengan Kota Samarinda. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 20 Kecamatan, 44 Kelurahan, dan 193 Desa.

Secara geografis desa Kerta Buana berada ditengah-tengah Kecamatan Tenggarong Seberang atau kira-kira berjarak 17 kilometer dari ibu kota kecamatan. Luas wilayah kurang lebih 3.610,16 Ha dengan jumlah penduduk terbaru tahun 2024 berjumlah 5.334 jiwa. Desa Kerta Buana memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 1. Batas wilayah desa

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Bukit Pariaman	Tenggarong Seberang
Sebelah Selatan	Embalut	Tenggarong Seberang
Sebelah Timur	Kodya Samarinda	Samarinda Utara
Sebelah Barat	Separ	Tenggarong Seberang

Sumber Data: Desa Kerta Buana dalam angka 2024

Desa Kerta Buana termasuk tidak terlalu jauh untuk ke Ibu Kota maka dari itu Desa Kerta Buana memiliki tingkat kebisingan ringan, sumber kebisingan hanya dari kendaraan bermotor sehingga hampir tidak ada efek terhadap penduduk. Jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut: Secara geografis Desa Kerta Buana memiliki data orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) adalah sebagai berikut:

- Jarak ke ibu kota kecamatan 17,00 Km
- Jarak ke ibu kota kabupaten/kota 33,00 Km
- Jarak ke ibu kota provinsi 35,00 Km

Selain batas wilayah peneliti juga harus mengetahui luas wilayah yang peneliti akan teliti. Berdasarkan data topografi, Desa Kerta Buana mempunyai luas kurang lebih 3.610,16 Ha.. Jika dirincikan menurut penggunaannya sebagai berikut:

Tabel 2. Luas wilayah desa

No	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	Total Luas
1.	Luas tanah sawah	395,00 Ha
2.	Luas tanah kering	696,11 Ha
3.	Luas tanah basah	83,00 Ha
4.	Luas tanah perkebunan	64,00 Ha
5.	Luas fasilitas umum	106,00 Ha
6.	Luas tanah hutan	2.266,06 Ha
7.	Total Luas	3.610,10 Ha

Sumber data: Kerta Buana dalam angka 2024

Desa Kerta buana merupakan desa/kelurahan dataran rendah seluas 6.975,00 Ha, serta berbukit-bukit seluas 1.046,50 Ha, Desa/kelurahan lereng gunung seluas 3.407,50 Ha, desa/kelurahan kawasan rawa seluas 581,00 Ha, desa/kelurahan aliran sungai seluas 1.162,50 Ha, desa/kelurahan bantaran sungai seluas 581,25 Ha.

Keadaan Penduduk

- Jumlah penduduk berdasarkan kelamin

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti di Desa Kerta Buana terdapat 1721 KK, dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah penduduk tahun 2024

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-laki	2.749 orang
Perempuan	2.585 orang
Total =	5.334 orang

Sumber Data: Desa Kerta Buana dalam angka 2024

Berdasarkan pada tabel 3. menggambarkan bahwa jumlah penduduk di Desa Kerta Buana; terdapat 2.749 Orang Laki-Laki, 2.585 Orang Perempuan. Sehingga dijumlahkan ada 5.334 Orang Penduduk di Desa Kerta Buana. 5.334 Orang jumlah Penduduk di Desa Kerta Buana memiliki banyak perbedaan, misalnya perbedaan suku, agama, dll. Desa Kerta Buana yang dikenal dengan kampung Bali dikarenakan mayoritas Suku Bali, tetapi tidak hanya Suku Bali banyak sekali suku-suku yang ada di Desa Kerta Buana. Jumlah penduduk Desa Kerta Buana berdasarkan suku sebagai berikut:

Tabel 4. Suku di Desa Kerta Buana

No	Suku	Laki-Laki	Perempuan
1.	Bali	963 orang	893 orang
2.	Batak	46 orang	48 orang
3.	Nias	-	1 orang
4.	Minang	4 orang	2 orang
5.	Sunda	4 orang	4 orang
6.	Jawa	730 orang	753 orang
7.	Madura	-	2 orang
8.	Banjar	25 orang	17 orang
9.	Dayak	3 orang	10 orang
10.	Bugis	26 orang	27 orang
11.	Sasak	862 orang	717 orang
12.	Minahasa	4 orang	2 orang
13.	Flores	3 orang	1 orang
14.	Papua	1 orang	-
15.	Sumba	-	1 orang
16.	Toraja	19 orang	20 orang
17.	Kutai	56 orang	77 orang
18.	Bima	3 orang	2 orang
19.	Dayak jawa	2 orang	-
20.	Sumbawa	2 orang	1 orang
21.	Wajo	1 orang	-
22.	Jumlah	2.754 orang	2.578 orang

Pada tabel 4. jumlah suku yang berada di Desa Kerta Buana, Suku Bali menjadi mayoritas di Desa Kerta Buana. Tidak hanya Suku Bali, Terdapat juga Suku Jawa dan Suku Sasak yang mendominasi Desa Kerta Buana. Jika di jumlahkan 3 Suku terbanyak di Desa Kerta Buana; 1.856 orang Suku Bali, 1.579 orang Suku Sasak, dan 1.483 orang Suku Jawa.

Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini, penulis menyajikan dan mengidentifikasi hasil penelitian yang diperoleh dari tempat penelitian. Sebelum menyajikan hasil penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sesuai dengan indikator-indikator yang terdapat pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Kerta Buana dan masyarakat desa yang memiliki kasta.

Data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini terdiri dari data hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

Pemahaman masyarakat Desa Kerta Buana mengenai sistem kasta

1. Sejarah Sistem Kasta

Sistem kasta Hindu-Bali berbeda dengan sistem kasta Hindu-India. Jika di Hindu-Bali menyebut sistem kasta sebagai "Catur warna", akan tetapi di India menyebut sistem kasta dengan "sistem Jatis". Di Bali, sistem lebih fleksibel dengan empat kasta utama (Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra) dan tanpa diskriminasi yang kaku seperti di India. Kasta Waisya dan Sudra sering dianggap setara, dan ada nama khusus untuk menunjukkan kasta. Sistem kasta Bali lebih menekankan adaptasi sosial dan peran spiritual Brahmana, sementara sistem India lebih hierarkis dan diskriminatif. Sistem Bali berkembang sejak pengaruh Hindu dari India pada abad 1-10 M sesuai budaya lokal, menjadikannya identitas budaya dan spiritual yang unik.

Hasil wawancara dengan informan inisial K sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Desa Kerta Buana terkait sejarah sistem kasta dalam Hindu Bali adalah sebagai berikut,

“Sistem kasta disini mengalami transformasi atau perubahan, pada awal berkembangnya agama Hindu, sistem kasta sebenarnya belum dikenal. Yang ada adalah konsep catur warna, yaitu pembagian peran atau tugas seseorang berdasarkan fungsinya. Misalnya, mereka yang memimpin upacara disebut Brahmana, para raja disebut Ksatria, pedagang disebut Waisya, dan petani disebut Sudra. Seiring waktu, pengetahuan dan keahlian dalam suatu bidang cenderung diwariskan dalam keluarga. Anak-anak Brahmana, misalnya, lebih dekat dengan ajaran agama karena lingkungan mereka, demikian pula anak-anak raja lebih memahami kepemimpinan. Lama-kelamaan, pembagian peran ini berubah menjadi sistem kasta yang diwariskan secara turun-temurun, seperti yang terjadi di Bali. Meskipun awalnya hanya pembagian tugas, kini status kasta seringkali dianggap sebagai hak keturunan dan sulit diubah. Namun, saat ini mulai terlihat perubahan, di mana dari kasta manapun seseorang bisa menjadi Brahmana jika memenuhi syarat, meskipun tidak berasal dari keturunan Brahmana. Jadi, sistem ini terus mengalami transformasi sesuai perkembangan zaman.”

Kemudian ditambah oleh pernyataan informan inisial P sebagai perwakilan masyarakat dari kasta sudra yang mengatakan bahwa:

“Sistem kasta adalah sebuah tatanan masyarakat yang membagi orang-orang ke dalam kelompok-kelompok yakni dimana setiap kelompok itu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Dan sistem ini sebenarnya sangat kaku dan sulit untuk berubah nah sistem kasta ini biasanya berlaku di daerah-daerah tertentu seperti di India dan di Bali. Kalau di desa kalau di desa kertabuana sistem kasta ini kadang-kadang sering dikesampingkan karena selama ini kita lihat, walaupun memang mayoritas orang Bali tetapi di sisi lain ada suku lain yang mungkin tidak menganut kasta. Jadi sistem kasta di desa kertabuana ini dikesampingkan.”

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara penulis dengan informan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa sejarah sistem kasta di Bali berbeda dengan sistem kasta di India karena bersifat lebih fleksibel dan mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Wawancara menjelaskan bahwa awalnya sistem kasta di Bali merupakan pembagian peran berdasarkan fungsi (catur warna) yang kemudian berkembang menjadi sistem kasta turun-temurun, namun kini mulai ada peluang bagi siapa saja untuk naik kasta berdasarkan kemampuan dan syarat tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa sistem kasta Bali lebih lentur dan menyesuaikan dengan budaya lokal, tidak seketar sistem kasta India yang sangat hierarkis.

Selain itu, pernyataan lain tentang pelonggaran sistem kasta di desa Kertabuana menunjukkan bahwa dalam praktik sosial sehari-hari, sistem kasta tidak selalu diterapkan secara kaku, terutama di komunitas yang beragam secara budaya. Ini mendukung penjelasan bahwa sistem kasta di Bali lebih inklusif dan adaptif dibandingkan di India, serta menjadi bagian dari identitas budaya yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Pemahaman masyarakat mengenai sistem kasta

Konsep sistem kasta dalam ajaran Hindu yang sebenarnya adalah Catur Warna, yaitu pembagian masyarakat menjadi empat kelompok berdasarkan bakat (guna) dan profesi (karma), bukan berdasarkan keturunan. Catur Warna terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, di mana setiap individu seharusnya dapat menempati posisi sesuai kemampuan dan pekerjaannya, sehingga sistem ini bersifat terbuka dan tidak membedakan derajat manusia berdasarkan asal-usul keluarga. Dalam ajaran Hindu, semua warna dianggap sama penting dan saling melengkapi, tanpa ada golongan yang lebih tinggi atau rendah secara

mutlak. Namun, dalam perkembangannya, konsep Catur Warna sering disalahartikan dan dipraktikkan sebagai sistem kasta yang diwariskan secara turun-temurun dan menimbulkan hierarki sosial yang kaku, padahal pemahaman yang benar menurut ajaran Hindu adalah penghargaan atas jasa dan peran, bukan sekadar status keturunan.

Hasil wawancara dengan informan inisial K selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Desa Kerta Buana terkait pemahaman sistem kasta dalam Hindu Bali, menyatakan bahwa:

“Sistem kasta seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai urusan keturunan. Saat ini, banyak orang menganggap kasta sama dengan warna, padahal sebenarnya tidak demikian. Memang, tidak ada salahnya menghormati leluhur yang dahulu menjadi Brahmana, Ksatria, atau kelompok warna lainnya, selama itu sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka di masa lalu. Namun, kenyataannya, tidak semua keturunan Brahmana menjadi pemimpin upacara, dan tidak semua keturunan Ksatria menjadi pemimpin atau raja. Banyak di antara mereka yang kini bekerja sebagai petani, sopir, atau profesi lainnya. Artinya, sistem kasta saat ini lebih merupakan warisan sejarah daripada pembagian peran nyata seperti dulu. Meskipun demikian, di masyarakat, khususnya di Bali, masih ada tekanan untuk tetap menghormati keturunan kasta tertentu, meskipun mereka tidak lagi menjalankan peran leluhurnya. Seringkali, penghormatan itu diberikan bukan karena jasa pribadi, melainkan karena jasa leluhur mereka di masa lalu. Pemahaman yang tepat adalah menghormati jasa leluhur, bukan semata-mata status keturunan yang ada saat ini.”

Kemudian ditambah oleh pernyataan informan inisial B selaku perwakilan masyarakat dari kasta Brahmana yang mengatakan bahwa:

“Sistem kasta itu sebenarnya suatu warisan, tapi sekarang ini sudah mulai digerus oleh zaman, di mana sistem yang berlaku sekarang itu lebih dilihat dari profesinya di masyarakat, jadi bukan semata-mata dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, atau Sudra seperti dulu lagi. Jadi sekarang orang lebih melihat apa yang dia kerjakan, apa profesinya, baru dinilai, bukan hanya dari keturunan atau warna saja. Jadi sistem kasta itu memang ada, tapi fungsinya sudah berubah mengikuti perkembangan zaman.”

Lalu, ditambahkan juga dengan pernyataan informan inisial D sebagai perwakilan masyarakat dari kasta Ksatria yang mengatakan bahwa:

“Sistem kasta di Bali itu sudah ada sejak lama, membagi masyarakat ke dalam kelompok seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ksatria biasanya dikenal sebagai prajurit atau pemimpin pemerintahan. Tapi sekarang sistemnya sudah lebih fleksibel, bukan hanya soal keturunan, tapi juga kemampuan dan profesi yang dijalankan. Jadi, meskipun saya dari Ksatria, saya lihat sekarang semua orang punya kesempatan yang sama dalam masyarakat.”

Pernyataan yang sama juga ditambahkan oleh informan inisial W selaku perwakilan masyarakat dari kasta waisya yang mengatakan bahwa:

“Sistem kasta itu awalnya mengatur peran masyarakat berdasarkan profesi, seperti Waisya yang biasanya pedagang atau petani. Tapi di Bali, sistem ini sudah banyak berubah dan lebih lunak. Orang sekarang lebih dinilai dari keahlian dan pekerjaannya, bukan hanya dari kasta. Jadi, meskipun saya dari Waisya, saya merasa punya peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di masyarakat.”

Pernyataan selanjutnya juga dikemukakan oleh informan inisial P sebagai perwakilan masyarakat dari kasta Sudra menyatakan sebagai berikut:

“Sistem kasta adalah sebuah tatanan masyarakat yang membagi orang-orang ke dalam kelompok-kelompok yakni di mana setiap kelompok itu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Dulu sistem kasta di Bali itu sangat ketat, dan Sudra seperti saya dianggap kasta paling bawah, biasanya sebagai pekerja atau petani. Tapi sekarang di Bali sistem kasta sudah

tidak sekeras dulu, lebih fleksibel. Apalagi di Desa Kerta Buana yang dimana beradaptasi dengan masyarakat lokal yang sudah mengesampingkan sistem kasta. Sekarang yang penting kemampuan dan usaha, bukan hanya asal-usul dari sebuah kasta. ”

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara penulis dengan informan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pengertian sistem kasta ini telah mengalami transformasi dari konsep Warna menjadi Wangsa di masyarakat Bali kemudian memunculkan sistem kasta sebagai bentuk pelabelan sosial. Namun, Warna sejatinya tidak berkaitan dengan kelahiran atau pewarisan golongan, melainkan lebih pada pembagian fungsi atau peran dalam masyarakat. Masyarakat Bali saat ini diharapkan mampu memposisikan seluruh krama secara setara tanpa membedakan berdasarkan Warna, Wangsa, atau kasta.

Hal ini sejalan dengan pernyataan wawancara yang menyatakan bahwa sistem kasta di Bali sudah lama ada, membagi masyarakat ke dalam kelompok seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, di mana Ksatria dulunya dikenal sebagai prajurit atau pemimpin pemerintahan. Namun, sistem kasta di Desa Kerta Buana kini lebih fleksibel, tidak hanya soal keturunan, tetapi juga kemampuan dan profesi yang dijalankan, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat.

Transformasi kekuasaan dalam sistem kasta Hindu Bali mempengaruhi struktur sosial masyarakat Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang

Transformasi kekuasaan dalam sistem kasta Hindu Bali telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap struktur sosial masyarakat di Desa Kerta Buana, terlihat pada tiga aspek utama: kekuasaan dalam upacara keagamaan yang kini lebih mengutamakan kemampuan individu, kekuasaan dalam pernikahan yang lebih fleksibel tanpa terikat kasta, serta kekuasaan dalam jabatan yang memberikan kesempatan merata berdasarkan kompetensi. Perubahan ini menunjukkan adaptasi sosial masyarakat yang tetap menjaga tradisi Hindu namun lebih terbuka dan setara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial K selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Desa Kerta Buana, menyatakan bahwa:

“Memang tidak bisa dipungkiri, ada semacam aura atau vibrasi yang muncul dari orang-orang berkasta tinggi seperti Brahmana dan Ksatria, meskipun mereka tidak selalu menjalankan fungsi sesuai peran asli. Biasanya, mereka memiliki kekuatan untuk memimpin, terutama dalam upacara agama. Contohnya, banyak Ida Bagus yang dengan kesempatan dan kemampuan ekonomi berusaha meneruskan tugas leluhur mereka. Namun, ada perbedaan sikap antara Brahmana dan Ksatria saat ini. Brahmana cenderung lebih terbuka dan mau belajar, tetap menjaga nilai-nilai spiritual. Sedangkan sebagian Ksatria lebih egois, mengagungkan jasa leluhur sebagai raja, seolah-olah mereka juga raja sekarang, padahal perilaku mereka tidak mencerminkan itu. Mereka lebih menuntut penghormatan semata karena status keturunan, bukan karena fungsi nyata yang dijalankan. Terkait keberadaan kasta di Bali dan Indonesia, sebaiknya kita pahami bahwa kasta adalah warisan yang dulunya merupakan pembagian tugas (warna) yang bisa berubah sesuai fungsi seseorang. Tidak seharusnya ada egoisme berlebihan atau penghormatan yang berlebihan jika seseorang tidak menjalankan tugas atau fungsi leluhurnya. Semua masyarakat desa pada dasarnya memahami bahwa kasta adalah sebuah perubahan fungsi yang bersifat dinamis, bukan status tetap yang mengikat.”

1. Kekuasaan dalam upacara keagamaan

Hasil wawancara dengan informan inisial K selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Desa Kerta Buana, menyatakan bahwa:

“Ada perbedaan sikap dalam pelaksanaan upacara agama di antara kasta di Bali. Kasta Sudra umumnya sangat terbuka, siapa pun boleh memimpin upacara, baik itu upacara kecil yang bisa dipimpin oleh anggota keluarga tertua, maupun upacara yang dipandu oleh pinandita atau pemangku dari kasta apa pun, termasuk Sudra, Waisya, atau Brahmana. Namun, berbeda dengan kasta Ksatria dan Brahmana. Mereka cenderung hanya menerima pemimpin upacara dari kasta mereka sendiri. Misalnya, dalam keluarga Brahmana atau Ksatria, jika ada upacara keagamaan, mereka enggan menggunakan pinandita atau pendeta dari kasta Sudra atau Waisya. Untuk upacara besar yang memerlukan sulinggih, mereka lebih memilih sulinggih dari keturunan Brahmana atau Ksatria, dan menolak menggunakan sulinggih dari Sudra atau Waisya, meskipun secara kemampuan agama sama. Padahal, secara esensi, seorang Brahmana adalah mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan agama untuk memimpin upacara, tanpa memandang asal keturunan. Namun, fanatisme terhadap garis keturunan masih sangat kuat di kalangan Brahmana dan Ksatria.”

Kemudian ditambah oleh pernyataan informan inisial B selaku perwakilan masyarakat dari kasta Brahmana yang mengatakan bahwa:

“Pada umumnya, yang memimpin acara adat maupun keagamaan adalah seseorang yang ditunjuk oleh lembaga resmi dan memiliki pengetahuan serta sertifikat sebagai pinandita atau pendeta. Penunjukan ini sudah diketahui dan disetujui oleh masyarakat serta adat setempat. Siapapun dari berbagai adat boleh memimpin, asalkan memenuhi kriteria tersebut dan diakui oleh komunitasnya.”

Lalu, ditambahkan juga dengan pernyataan informan inisial D sebagai perwakilan masyarakat dari kasta Ksatria, mengatakan bahwa:

“Memang nyata bahwa, tadisi dan asal-usul keluarga memiliki peran penting dalam melestarikan budaya kita, khususnya dalam hal keagamaan dan kepemimpinan. Kami merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai adat serta spiritual. Namun, saya juga menyadari bahwa kemampuan dan niat baik seseorang perlu dihargai, sehingga dalam beberapa hal kami mulai lebih terbuka menerima peran dari luar kelompok kami, asalkan mereka memiliki kemampuan dan dedikasi yang baik.”

Pernyataan yang sama juga ditambahkan oleh informan inisial W selaku perwakilan masyarakat dari kasta Waisya yang mengatakan bahwa:

“Sekarang sudah banyak perubahan, peran dan kesempatan tidak lagi hanya soal asal-usul keluarga. Banyak orang yang aktif dan berperan di berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Kami berharap semua orang bisa dihargai berdasarkan kemampuan dan usaha mereka.”

Pernyataan wawancara selanjutnya juga dikemukakan oleh informan inisial P sebagai perwakilan masyarakat dari kasta Sudra menyatakan sebagai berikut:

“Di Desa Kertabuana, tidak selalu seseorang yang menjadi Brahmana berasal dari kasta Brahmana sejak lahir. Ada pula individu dari kasta Sudra yang naik menjadi Brahmana dan berperan sebagai pemuka agama. Penting untuk dipahami bahwa status Brahmana tidak selalu identik dengan peran sebagai pendeta, karena banyak Brahmana yang tidak menjalankan tugas keagamaan tersebut. Kenaikan kasta lebih didasarkan pada kemampuan dan pengetahuan individu, bukan semata-mata karena keturunan.”

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara penulis dengan informan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan upacara agama di Bali terdapat perbedaan sikap antar kasta, di mana kasta Sudra lebih terbuka menerima siapa saja sebagai pemimpin upacara, sementara kasta Ksatria dan Brahmana cenderung memilih pemimpin dari kasta mereka sendiri karena masih kuatnya fanatisme terhadap garis keturunan meskipun kemampuan agama sama. Namun, untuk di Desa Kerta Buana ini yang kini penempatan pemimpin lebih menekankan pada kemampuan, pengetahuan, dan dedikasi

individu tanpa memandang keturunan semata. Masyarakat di Desa Kerta Buana cenderung lebih terbuka dan egaliter, memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja yang memiliki kompetensi untuk memimpin upacara, termasuk individu yang naik kasta atau berasal dari kasta yang berbeda.

2. Kekuasaan dalam Pernikahan

Hasil wawancara dengan informan inisial K selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Desa Kerta Buana, menyatakan bahwa:

“Saat ini, pernikahan beda kasta di Bali sudah menunjukkan kemajuan meskipun perubahan berjalan secara bertahap. Banyak masyarakat mulai menerima pernikahan antar kasta, namun sebagian kecil keluarga Brahmana atau Ksatria masih mempertahankan tradisi untuk tidak menikah dengan kasta yang dianggap lebih rendah demi menjaga status. Meskipun pernikahan beda kasta semakin diterima, tata cara dan tradisi adat kasta tetap dijalankan, seperti aturan khusus dalam proses meminang dan ritual tertentu sebelum pernikahan. Di masa lalu, pelanggaran aturan ini bisa berakibat hukuman berat, termasuk pembuangan ke Nusa Penida, yang merupakan tempat pembuangan sosial, bukan hanya untuk pelaku kriminal. Kini, hukuman tersebut sudah tidak berlaku, dan masyarakat lebih terbuka terhadap pernikahan lintas kasta, meskipun tradisi dan tata cara adat masih tetap dihormati.”

Kemudian dari hasil wawancara, pernyataan tambahan dari informan inisial B selaku perwakilan masyarakat dari kasta Brahmana, mengatakan bahwa:

“Di desa ini, pernikahan antar kasta, seperti antara Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, sebenarnya kembali pada kesepakatan kedua belah pihak saat masa pacaran. Dalam agama Hindu, pernikahan antar kasta cukup fleksibel, meskipun ada anggapan bahwa pernikahan antara kasta Brahmana dengan Waisya bisa dianggap "turun kasta." Namun, yang lebih penting adalah bagaimana perilaku dan kesepakatan keluarga dari kedua belah pihak. Kadang memang ada tekanan dari keluarga, tapi di sini pernikahan beda kasta tidak terlalu banyak dan sudah lebih fleksibel karena tidak menekankan soal kasta. Dalam pernikahan, yang utama adalah kesepakatan bersama, dan setelah berkeluarga, semua dianggap sama tanpa memandang tinggi rendahnya kasta.”

Lalu, ditambahkan juga dengan pernyataan wawancara informan inisial D sebagai perwakilan masyarakat dari kasta Ksatria yang mengatakan bahwa:

“Dulu memang ada aturan ketat soal pernikahan, tapi sekarang kami lebih melihat ke pribadi dan keseriusan pasangan. Selama ada kesepakatan dan saling menghargai, perbedaan kasta bukan halangan.”

Pernyataan wawancara yang sama juga ditambahkan oleh informan inisial W selaku perwakilan masyarakat dari kasta Waisya yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa sekarang yang terpenting itu bagaimana kita bisa hidup rukun dan saling mendukung. Pernikahan beda kasta bukan masalah besar selama kedua keluarga bisa menerima dan menjaga hubungan baik.”

Pernyataan selanjutnya juga dikemukakan oleh informan inisial P sebagai perwakilan masyarakat dari kasta Sudra menyatakan sebagai berikut:

“Pernikahan antar kasta, seperti antara Brahmana dan Sudra, sering terjadi di sini. Hal ini biasanya tergantung pada kesepakatan dan perasaan suka sama suka antara kedua pihak. Di Desa kami, sebagian besar masyarakat tidak mempermasalahkan pernikahan beda kasta, karena yang terpenting adalah keharmonisan dan kesepakatan dalam hubungan tersebut.”

Berdasarkan beberapa pernyataan hasil wawancara penulis dengan informan di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa kekuasaan dalam pernikahan dalam konteks kasta di Desa Kerta Buana menunjukkan bahwa meskipun sistem kasta masih menjadi bagian dari tradisi, pandangan masyarakat kini lebih terbuka dan fleksibel terhadap pernikahan beda

kasta. Kesepakatan dan keharmonisan antara kedua belah pihak keluarga menjadi faktor utama, sementara tekanan dari keluarga atau adat mulai berkurang. Perubahan ini juga tercermin dari berkurangnya sanksi keras yang dulu melekat pada pernikahan lintas kasta. Namun, tata cara dan tradisi adat tetap dihormati sebagai bagian dari identitas budaya.

3. Kekuasaan dalam Jabatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial K sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Desa Kerta Buana, mengatakan bahwa:

“Ya, jelas ada perubahan dalam hubungan kekuasaan antara kasta di desa ini dalam beberapa tahun terakhir. Di masa modern sekarang, kita tidak lagi melihat seseorang harus menduduki posisi tertentu hanya karena keturunannya. Misalnya, kepala desa, pengelola pariwisata, atau pemangku tidak selalu berasal dari kasta Brahmana atau Ksatria. Di Desa Kertabuana, semua orang didorong untuk maju berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan pendidikan mereka. Memang, tiga faktor utama yang memengaruhi adalah keturunan, pengalaman, dan pendidikan. Namun, keturunan saja tidak cukup jika seseorang tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu, jabatan penting di desa kita pernah dipegang oleh orang dari kasta Ksatria, Sudra, maupun Brahmana, termasuk di Parisada. Masyarakat kita sudah memahami makna sebenarnya bahwa penghormatan diberikan kepada leluhur, bukan secara otomatis kepada keturunan tanpa jabatan atau kemampuan. Jadi, penghormatan kepada seseorang karena jabatannya sekaranglah yang utama, bukan semata-mata karena asal kastanya.”

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan tambahan dari informan inisial B selaku perwakilan masyarakat dari kasta Brahmana, mengatakan bahwa:

Desa Kerta Buana sekarang, sistem kasta sudah tidak terlalu mempengaruhi kesempatan kerja. Peluang pekerjaan lebih bergantung pada kemampuan dan keterampilan masing-masing individu. Penempatan kerja dilakukan secara adil tanpa memberikan keistimewaan berdasarkan kasta. Jadi, semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, asalkan punya skill dan usaha yang baik. Sistem ini menunjukkan perubahan dari tradisi lama ke arah yang lebih terbuka dan adil dalam masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara informan inisial D selaku perwakilan masyarakat dari kasta Ksatria, mengatakan bahwa:

“Dulu mungkin kasta lebih berpengaruh dalam menentukan jabatan atau pekerjaan, tapi sekarang kami melihat perubahan besar. Yang penting sekarang adalah kemampuan dan kesungguhan seseorang. Di desa kami, siapa pun bisa mendapatkan posisi, asal memang layak dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ini membuat masyarakat jadi lebih adil dan terbuka.”

Pernyataan wawancara yang sama juga ditambahkan oleh informan inisial W selaku perwakilan masyarakat dari kasta Waisya yang mengatakan bahwa:

“Kesempatan kerja dan jabatan sekarang tidak lagi soal asal-usul keluarga atau kasta. Semua orang punya peluang yang sama selama punya keterampilan dan usaha. Ini membuat suasana di desa lebih harmonis dan semua bisa berkembang tanpa dibatasi oleh tradisi lama.”

Berdasarkan hasil wawancara, pernyataan tambahan dari informan inisial P selaku perwakilan masyarakat dari kasta Sudra, mengatakan bahwa:

“Kalau di desa kerta buana dalam pemerintahan atau sebuah jabatan itu tidak terikat lagi oleh Kasta, sama sekali tidak terikat lagi. Semua mengikuti arus pergerakan dinamika di masyarakat kalau yang memang mampu dari Brahmana mengapa tidak, ketika yang diinginkan itu mampu dari kasta Sudra atau Waisya yaitu yang malah menduduki jabatan itu. Jadi sudah tidak ada sekat jika dipandang dari sisi pemerintahan dari tingkat Desa

maupun tingkat pusat pun sama. Pejabat-pejabat Hindu di Indonesia tidak lagi terikat dengan keturunan atau kasta itu sendiri.”

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara penulis dengan informan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa transformasi kekuasaan sistem kasta pada jabatan di Desa Kerta Buana telah mengalami perubahan signifikan. Saat ini, jabatan dan posisi dalam pemerintahan maupun pekerjaan tidak lagi ditentukan oleh latar belakang kasta, melainkan lebih menekankan pada kemampuan, keterampilan, dan kesungguhan individu. Kesempatan untuk menduduki jabatan terbuka bagi siapa saja tanpa memandang asal-usul, sehingga sistem yang berlaku menjadi lebih adil, terbuka, dan egaliter. Seperti halnya dalam gambar 4.5 merupakan masyarakat dari berbagai kasta bahkan kebanyakan dari kasta sudra yang memiliki jabatan.

Jadi, kesimpulan secara keseluruhan hasil wawancara dan observasi mengenai transformasi kekuasaan dalam sistem kasta Hindu Bali di Desa Kerta Buana mempengaruhi struktur sosial masyarakat, di mana masyarakat khususnya di Bali masih yang masih sekarang masyarakat desa telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Dalam aspek upacara keagamaan, pemilihan pemimpin upacara kini lebih mengutamakan kemampuan, pengetahuan, dan dedikasi individu, tanpa terlalu mempertimbangkan garis keturunan atau asal-usul kasta. Seperti dokumentasi gambar diatas merupakan perkumpulan masyarakat yang memiliki jabatan dari berbagai kasta, dalam gambar yang menduduki sebagai pemimpin kebanyakan yang berasal dari kasta sudra dan tidak hanya dari kasta atas seperti brahmana dan ksatria. Hal serupa juga terjadi dalam pernikahan, di mana masyarakat semakin terbuka terhadap pernikahan lintas kasta. Kesepakatan dan keharmonisan antar keluarga menjadi faktor utama, sementara tekanan adat dan sanksi sosial terhadap pernikahan beda kasta semakin berkurang. Tradisi dan tata cara adat tetap dihormati, namun tidak lagi menjadi penghalang utama dalam kehidupan sosial.

Selain itu, perubahan signifikan juga terlihat dalam penempatan jabatan dan posisi sosial di Desa Kerta Buana. Kesempatan untuk menduduki jabatan di pemerintahan maupun di bidang pekerjaan kini terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang kasta. Penilaian lebih didasarkan pada kemampuan, keterampilan, dan kesungguhan individu. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, terbuka, dan egaliter, di mana setiap warga memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Secara keseluruhan, masyarakat Desa Kerta Buana telah berhasil mengadaptasi nilai-nilai tradisi Hindu Bali dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif.

Kesetaraan sosial antar kasta dalam sistem kasta Hindu Bali di Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang

Di Desa Kerta Buana, kesetaraan sosial antar kasta dalam pendidikan dan pekerjaan mengalami kemajuan signifikan. Akses pendidikan kini terbuka untuk semua kasta, memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak mengembangkan kemampuan. Dalam pekerjaan, penilaian lebih didasarkan pada kemampuan dan dedikasi, bukan asal-usul kasta. Peluang kerja dan jabatan terbuka tanpa diskriminasi, menciptakan lingkungan yang lebih adil. Meskipun tradisi Hindu Bali tetap dijaga, sistem kasta tidak lagi menghalangi kesempatan sosial, menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman dengan tetap mempertahankan identitas budaya.

4. Aspek Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial K selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Desa Kerta Buana menyatakan bahwa:

“Di masa lalu, ada dua faktor yang membatasi akses belajar bagi kasta Waisya dan Sudra. Pertama, mereka dianggap rendah dan tidak diajarkan ilmu secara formal. Kedua, hanya keturunan Brahmana yang dekat dengan guru dan berhak belajar, seperti yang tercermin dalam ajaran Upanisad. Hal ini kemudian dipolitisasi dengan larangan belajar bagi kasta rendah, yang diungkapkan dalam sloka seperti “jangan diberikan kepada yang salah,” yang berarti ilmu tidak boleh diberikan kepada orang Sudra atau Waisya.

Contohnya, Bambang Eka yang mau beguru kepada Drona karena dia sudah tidak diterima belajar secara resmi, lalu belajar secara mandiri dan akhirnya mendapatkan pencerahan. Ini menunjukkan bagaimana pembatasan belajar dulu sangat ketat, hanya Brahmana dan kasta atas yang boleh menguasai ilmu agama dan kesaktian, sementara kasta rendah hanya menjadi pelayan. Namun, berbeda dengan di Jawa, di mana siapa pun yang mau belajar dan mampu disebut “Mpu” atau orang yang mengayomi, bisa belajar dan menguasai ilmu agama. Di sana, bahkan orang yang awalnya terlantar bisa menjadi Mpu jika memiliki ilmu tinggi. Jadi, meskipun Hindu di Bali mengikuti sistem kasta seperti di India, di Jawa ada tradisi yang lebih terbuka dalam hal pendidikan dan ilmu pengetahuan.”

Kemudian ditambahkan oleh pernyataan dari informan inisial B selaku perwakilan masyarakat dari kasta Brahmana, mengatakan bahwa:

“Yang jelas dari tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi, yang dahulunya orang tuanya sebagai petani hanya lulusan sd seperti orang tua saya dahulu keduanya itu tidak tamat SD tetapi di lingkungan keluarga sendiri sekarang bisa dibilang minimal S1 begitupun juga sekarang di lingkungan tetangga masyarakat mengenyam pendidikan minimal SMA dan banyak juga sekarang yang mengejar sarjana. Jadi dalam jenjang pendidikan sekarang sudah mengalami peningkatan sesuai dengan zaman sekarang.”

Kemudian berrdasarkan hasil wawancara pernyataan tambahan dari informan inisial D selaku perwakilan masyarakat dari kasta Ksatria, mengatakan bahwa:

“Pendidikan di Desa Kerta buana yang saya lihat semakin meningkat, dengan tingkat buta huruf yang kini sangat rendah, mungkin hanya beberapa persen saja. Saat ini, sistem kasta tidak lagi menjadi penghalang untuk mengenyam pendidikan. Semua orang, tanpa memandang kasta, bersaing berdasarkan kemampuan, keahlian, dan pengetahuan masing-masing. Meskipun mayoritas penduduk di desa ini beragama Hindu Bali, penerapan sistem kasta secara ketat sudah tidak lagi dijalankan. Sistem kasta lebih banyak dikesampingkan atau ditempatkan pada posisi kedua, sehingga pendidikan dan kesempatan berkembang terbuka untuk semua kalangan.”

Pernyataan wawancara yang sama juga ditambahkan oleh informan inisial W selaku perwakilan masyarakat dari kasta Waisya yang mengatakan bahwa:

“Dulu, pendidikan itu lebih banyak dikuasai oleh kasta atas, tapi sekarang kesempatan belajar sudah merata. Anak-anak dari semua kasta, termasuk Waisya dan Sudra, bisa mengenyam pendidikan dan mengembangkan kemampuan mereka. Hal ini membuat persaingan di dunia kerja menjadi lebih sehat dan adil, karena yang dinilai adalah kemampuan dan keahlian, bukan asal-usul kasta.”

Pernyataan selanjutnya juga dikemukakan oleh informan inisial P sebagai perwakilan masyarakat dari kasta Sudra menyatakan sebagai berikut:

Di Bali dahulu, dalam hal pendidikan yang berasal dari kasta Sudra sangat terbatas dan sulit diakses karena dianggap bukan hak kami dan juga keterbatasan ekonomi kami. Namun sekarang, semuanya sudah berubah. Pendidikan sudah terbuka untuk semua orang tanpa memandang kasta. Di Desa Kerta Buana, anak-anak dari kasta Sudra kini bisa sekolah tinggi dan bersaing secara setara dengan yang lain. Jika dari segi ekonomi dan kemampuan dari anak bisa mencari beasiswa seperti sekarang, pasti bisa mengejar pendidikan setinggi mungkin.”

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara penulis dengan informan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa transformasi sistem kasta Hindu Bali di Desa Kerta Buana kini setara terutama dalam aspek pendidikan, semua masyarakat bisa bersekolah hingga jenjang SMA/SMK dan tidak sedikit pula anak-anak di desa ini juga merupakan lulusan dari sarjana. Transformasi menuju kesetaraan dalam bidang pendidikan telah membawa perubahan positif yang signifikan. Masyarakat desa kini merasakan akses pendidikan yang lebih terbuka tanpa memandang latar belakang kasta, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan dan bersaing secara setara. Kesempatan belajar yang merata ini dianggap sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang yang lebih luas dalam dunia kerja dan sosial.

5. Aspek Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial K selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Desa Kerta Buana menyatakan bahwa:

“Ya, jelas ada perubahan dalam hubungan kekuasaan antara kasta di desa ini dalam beberapa tahun terakhir. Di masa modern sekarang, kita tidak lagi melihat seseorang harus menduduki posisi tertentu hanya karena keturunannya. Misalnya, kepala desa, pengelola pariwisata, atau pemangku tidak selalu berasal dari kasta Brahmana atau Ksatria. Di Desa Kertabuana, semua orang didorong untuk maju berdasarkan pengalaman, kemampuan, dan pendidikan mereka. Memang, tiga faktor utama yang memengaruhi adalah keturunan, pengalaman, dan pendidikan. Namun, keturunan saja tidak cukup jika seseorang tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu, jabatan penting di desa kita pernah dipegang oleh orang dari kasta Ksatria, Sudra, maupun Brahmana, termasuk di Parisada. Masyarakat kita sudah memahami makna sebenarnya bahwa penghormatan diberikan kepada leluhur, bukan secara otomatis kepada keturunan tanpa jabatan atau kemampuan. Jadi, penghormatan kepada seseorang karena jabatannya sekaranglah yang utama, bukan semata-mata karena asal kastanya.”

Kemudian ditambahkan oleh pernyataan dari informan inisial B selaku perwakilan masyarakat dari kasta Brahmana, mengatakan bahwa:

“Dulu mungkin kasta menentukan pekerjaan, tapi sekarang di Desa Kerta Buana saya lihat semua orang punya kesempatan yang sama. Yang penting kemampuan dan dedikasi dalam bekerja. Saya sendiri sebagai Brahmana juga menghargai kalau ada warga dari kasta lain yang bisa memimpin atau berkontribusi dalam pekerjaan desa. Ini membuat masyarakat lebih solid dan adil.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara pernyataan tambahan dari informan inisial D selaku perwakilan masyarakat dari kasta Ksatria, mengatakan bahwa:

“Memang tak bisa dipungkiri kalau keturunan kasta Ksatria biasanya ada yang meneruskan posisi atau jabatannya karena umat Hindu percaya pada kelahiran kembali. Namun, di Desa Kerta Buana, masyarakat lebih menilai orang dari keahlian dan keseriusannya dalam bekerja, bukan dari kasta. Jadi, baik Ksatria, Waisya, maupun Sudra, semua bisa bekerja dan mendapat posisi yang layak selama mereka mampu. Hal ini sangat baik untuk kemajuan desa.”

Pernyataan wawancara yang sama juga ditambahkan oleh informan inisial W selaku perwakilan masyarakat dari kasta Waisya yang mengatakan bahwa:

“Saya merasakan perubahan yang besar. Sekarang pekerjaan tidak dibatasi oleh kasta. Banyak teman dari Sudra yang punya kemampuan hebat dan mendapat kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Jadi, di Desa Kerta Buana, sistem kasta tidak lagi menjadi penghalang untuk berkembang.”

Pernyataan selanjutnya juga dikemukakan oleh informan inisial P sebagai perwakilan masyarakat dari kasta Sudra menyatakan sebagai berikut:

“Dahulu rasanya terbilang sulit untuk mendapat pekerjaan yang layak karena kasta. Tapi sekarang sudah berbeda. Di Desa Kerta Buana, yang penting adalah kemampuan dan kerja keras. Saya sendiri sudah dipercaya memegang beberapa tugas penting di desa. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam pekerjaan benar-benar terjadi di sini.”

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara penulis dengan informan di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kesetaraan sosial antar kasta di Desa Kerta Buana dalam hal pekerjaan menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana akses dan peluang kini didasarkan pada kemampuan dan usaha individu, bukan keturunan. Berikut pada gambar 4.6 merupakan dokumentasi anggota kepolisian yang berasal dari kasta sudra dan waisya yang memperkuat pernyataan bahwa sistem kasta tidak lagi menjadi pengaruh yang besar dalam akses pekerjaan, karena kembali lagi kepada ajaran Catur Warna dimana seseorang dilihat dari kualitas kerja dan bakat individu, bukan berdasarkan garis keturunan.

Secara keseluruhan penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kesetaraan sosial antar kasta di Desa Kerta Buana dalam pendidikan dan pekerjaan menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana akses dan peluang kini didasarkan pada kemampuan dan usaha individu, bukan keturunan. Transformasi ini memperkuat integrasi sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis, sambil tetap menjaga nilai-nilai dan tradisi Hindu Bali sebagai identitas budaya yang penting.

Pembahasan

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan pembahasan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian pada skripsi ini yaitu mengenai Transformasi Kekuasaan dan Kesetaraan dalam Sistem Kasta Hindu Bali (Studi Kasus di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang).

Pemahaman Sistem Kasta bagi Masyarakat Desa Kerta Buana

1. Sejarah Kasta

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam kajian sistem kasta di Bali adalah kaburnya konsep wangsa atau kasta sebagaimana diajarkan dalam ajaran Catur Varna dalam agama Hindu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan agama dan kurangnya penyebaran kitab suci Weda secara merata kepada masyarakat. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Hindu menjadi beragam, bahkan sering kali terbatas. Kondisi ini menyebabkan praktik keagamaan yang berjalan lebih banyak didasarkan pada tradisi dan kebiasaan lokal, yang tidak selalu sesuai dengan ajaran Hindu secara murni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Kerta Buana, dapat disimpulkan bahwa sistem kasta di Bali memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem kasta di India. Sistem kasta Bali bersifat lebih fleksibel dan mengalami transformasi signifikan dari waktu ke waktu. Awalnya, sistem ini berakar pada pembagian peran berdasarkan fungsi masyarakat yang dikenal dengan konsep Catur Varna (Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra) yang lebih menekankan pada fungsi sosial daripada keturunan. Namun, seiring perkembangan zaman, sistem ini mengalami pergeseran menjadi sistem kasta yang diwariskan turun-temurun. Meskipun demikian, wawancara menunjukkan adanya pelonggaran dan peluang bagi individu untuk “naik kasta” berdasarkan kemampuan, prestasi, dan syarat tertentu, bukan semata-mata karena garis keturunan. Hal ini menegaskan bahwa sistem kasta di Bali lebih lentur dan menyesuaikan dengan budaya lokal yang dinamis, berbeda dengan sistem kasta India yang sangat kaku dan hierarkis.

2. Pemahaman masyarakat kasta

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis terkait pemahaman kasta. Sistem kasta merupakan penggolongan masyarakat kedalam beberapa lapisan pada masyarakat hindu, wawancara dengan warga Desa Kerta Buana mengungkapkan bahwa

dalam praktik sosial sehari-hari, sistem kasta tidak selalu diterapkan secara kaku, terutama di komunitas yang multikultural dan beragam secara etnis. Desa ini yang dihuni oleh banyak suku, termasuk Bali, Jawa, Sasak, dan lainnya, menunjukkan bahwa sistem kasta di Bali cenderung inklusif dan adaptif. Hal ini memungkinkan terciptanya harmoni sosial dan rasa persatuan yang kuat di tengah keberagaman. Sikap pelonggaran sistem kasta ini juga tercermin dalam kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan seluruh warga tanpa diskriminasi kasta. Dengan demikian, sistem kasta di Bali bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sebuah struktur sosial yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan konteks lokal.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Hindu Bali di desa Kerta Buana terhadap sistem kasta telah mengalami transformasi dari konsep asli Warna menjadi Wangsa, yang kemudian berkembang menjadi pelabelan sosial dalam bentuk kasta. Sebenarnya, konsep Warna dalam ajaran Hindu lebih menekankan pada pembagian fungsi atau peran dalam masyarakat, bukan berdasarkan kelahiran atau pewarisan golongan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Hindu Bali mulai memposisikan wangsa atau kasta sebagai identitas sosial yang diwariskan. Meski demikian, perkembangan sosial di Desa Kerta Buana menunjukkan adanya kesadaran untuk memposisikan seluruh krama secara setara tanpa membedakan berdasarkan Warna, Wangsa, atau kasta. Hal ini tercermin dari wawancara yang menyebutkan bahwa sistem kasta di desa ini sudah lama ada dan membagi masyarakat ke dalam kelompok Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, namun kini lebih fleksibel dan mengakomodasi kemampuan serta profesi individu.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menggarisbawahi bahwa sistem kasta Hindu Bali, khususnya di Desa Kerta Buana, telah mengalami proses transformasi yang signifikan dari sistem yang kaku dan hierarkis menjadi sistem yang lebih fleksibel, inklusif, dan adaptif. Faktor pendidikan, penyebaran ajaran agama, serta dinamika sosial budaya lokal berperan penting dalam proses ini. Sistem kasta yang lentur ini memungkinkan terwujudnya kesetaraan sosial dan kerukunan antarwarga dari berbagai suku, sekaligus menjaga keberlanjutan identitas budaya Hindu Bali yang khas.

Transformasi kekuasaan dalam sistem kasta Hindu Bali

Sistem kasta di Bali secara tradisional mengatur distribusi kekuasaan dan peran sosial berdasarkan golongan Wangsa, dengan Brahmana dan Ksatria sebagai kelompok yang dominan dalam aspek keagamaan dan kepemimpinan, sementara Sudra seringkali berada pada posisi subordinat. Namun, hasil wawancara di Desa Kerta Buana menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan ini, yang dipengaruhi oleh modernisasi, akses pendidikan, dan perkembangan sosial budaya. Transformasi ini memperluas definisi kekuasaan, tidak lagi semata-mata berdasarkan garis keturunan, melainkan lebih menitikberatkan pada kemampuan, pengetahuan, dan dedikasi individu.

1. Kekuasaan dalam Upacara Keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan upacara keagamaan di Bali masih menunjukkan perbedaan sikap antar kasta. Kasta Brahmana dan Ksatria cenderung mempertahankan tradisi memilih pemimpin upacara dari kasta mereka sendiri, yang mencerminkan adanya fanatisme terhadap garis keturunan meskipun kemampuan agama individu lain setara. Sebaliknya, kasta Sudra lebih terbuka menerima siapa saja sebagai pemimpin upacara. Namun, di Desa Kerta Buana, penempatan pemimpin upacara kini lebih mengutamakan kompetensi dan dedikasi, tanpa membedakan latar belakang kasta. Sikap egaliter ini menunjukkan bahwa masyarakat desa semakin mengedepankan kemampuan individu sebagai dasar legitimasi kepemimpinan dalam upacara keagamaan, sekaligus mengurangi ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat pembatasan kasta.

2. Kekuasaan dalam Pernikahan

Teori sistem kasta menurut Amalados, mendefinisikan sistem kasta adalah suatu cara mengorganisasikan masyarakat. Orang-orang yang termasuk suatu kasta tidak mengadakan ikatan perkawinan di luar kasta mereka. Dengan demikian sebuah kasta bersifat turun temurun orang-orang dilahirkan dalam suatu kasta. Sebuah kasta bercirikhaskan suatu pekerjaan khusus seperti bertani, menjadi prajurit, berdagang, dan sebagainya. Masyarakat berupa penataan berbagai kasta secara hirarkis.

Dalam konteks pernikahan, wawancara mengungkapkan bahwa meskipun sistem kasta masih menjadi bagian dari tradisi, masyarakat Desa Kerta Buana kini menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan fleksibel terhadap pernikahan beda kasta. Kesepakatan dan keharmonisan antara kedua keluarga menjadi faktor utama dalam keberhasilan pernikahan, sementara tekanan adat dan sanksi sosial yang dulu melekat pada pernikahan lintas kasta mulai berkurang. Hal ini menandakan adanya perubahan sosial yang signifikan, di mana nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap pilihan individu semakin menguat, tanpa menghilangkan penghormatan terhadap tata cara dan tradisi adat sebagai bagian dari identitas budaya.

3. Kekuasaan dalam Jabatan

Transformasi kekuasaan juga terjadi dalam aspek jabatan dan posisi sosial di Desa Kerta Buana. Wawancara menunjukkan bahwa jabatan dalam pemerintahan maupun pekerjaan tidak lagi ditentukan oleh latar belakang kasta, melainkan lebih menekankan pada kemampuan, keterampilan, dan kesungguhan individu. Kesempatan untuk menduduki posisi strategis terbuka bagi seluruh warga tanpa memandang asal-usul kasta, sehingga sistem sosial menjadi lebih adil, terbuka, dan egaliter. Perubahan ini mencerminkan kemajuan sosial yang signifikan dalam mengikis batasan-batasan tradisional dan membuka ruang mobilitas sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi di Desa Kerta Buana memperlihatkan bahwa transformasi kekuasaan dalam sistem kasta Hindu Bali telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Dalam aspek upacara keagamaan, pemilihan pemimpin kini lebih mengedepankan kemampuan dan dedikasi, sementara dalam pernikahan, masyarakat semakin menerima pernikahan lintas kasta dengan menitikberatkan pada keharmonisan keluarga. Di bidang jabatan dan pekerjaan, kesempatan terbuka bagi siapa saja yang kompeten tanpa diskriminasi kasta. Meski sistem kasta masih memengaruhi struktur sosial, Desa Kerta Buana menunjukkan bahwa fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan sosial mampu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan egaliter, sekaligus tetap menjaga tradisi dan identitas budaya sebagai landasan kehidupan bersama.

Kesetaraan Sosial Antar Kasta dalam Sistem Kasta

Sistem kasta di Bali, seperti halnya stratifikasi sosial pada umumnya, merupakan fenomena yang kompleks dan penuh kontroversi. Stratifikasi sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang menentukan posisi dan kedudukan seseorang dalam struktur sosial. Dalam konteks agama Hindu Bali, sistem kasta memberikan warna tersendiri dalam pembagian kelas sosial, meskipun secara teori masih memungkinkan adanya mobilitas sosial antar kasta. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tantangan untuk mencapai kesetaraan sosial di tengah sistem kasta ini masih menjadi isu penting yang perlu terus diupayakan solusinya.

1. Akses Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Kerta Buana, dapat disimpulkan bahwa transformasi sistem kasta Hindu Bali telah membawa perubahan yang signifikan terutama dalam bidang pendidikan. Kini, akses pendidikan di desa ini terbuka

secara merata bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang kasta. Semua anak-anak desa memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga jenjang SMA/SMK, bahkan tidak sedikit yang melanjutkan hingga tingkat sarjana. Kesetaraan dalam pendidikan ini menjadi faktor kunci dalam membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan bersaing secara setara di dunia kerja dan sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial yang selama ini dipengaruhi oleh sistem kasta, sekaligus mendorong perubahan positif dalam kualitas hidup warga desa.

2. Akses Pekerjaan

Selain di bidang pendidikan, wawancara juga mengungkapkan bahwa kesetaraan sosial antar kasta di Desa Kerta Buana telah menunjukkan kemajuan yang nyata dalam aspek pekerjaan. Akses dan peluang kerja kini lebih banyak didasarkan pada kemampuan, usaha, dan kompetensi individu, bukan semata-mata keturunan atau kasta asal. Hal ini memperkuat integrasi sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Meskipun demikian, masyarakat desa tetap menjaga nilai-nilai dan tradisi Hindu Bali sebagai identitas budaya yang penting. Dengan kata lain, transformasi sosial ini tidak menghilangkan akar budaya, melainkan menjadikan tradisi sebagai fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang adil dan setara.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi di Desa Kerta Buana menunjukkan bahwa meskipun kontroversi dan tantangan sistem kasta masih ada, transformasi menuju kesetaraan sosial telah berjalan dengan baik, terutama melalui akses pendidikan dan peluang kerja yang merata. Stratifikasi sosial dalam sistem kasta tidak lagi menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Desa Kerta Buana menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat mengelola tradisi dan nilai agama Hindu Bali sekaligus mendorong kemajuan sosial yang inklusif dan harmonis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Transformasi Kekuasaan dan Kesetaraan dalam Sistem Kasta Hindu Bali (Studi kasus di desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang), maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Kerta Buana mengenai Sistem Kasta:

Masyarakat Hindu Bali di desa Kerta Buana memahami bahwa sistem kasta telah mengalami transformasi dari konsep asli Catur Warna dalam ajaran Hindu yang lebih menekankan pada pembagian fungsi atau peran dalam masyarakat, bukan berdasarkan kelahiran atau pewarisan golongan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Hindu Bali mulai memposisikan wangsa atau kasta sebagai identitas sosial yang diwariskan. Meski demikian, perkembangan sosial di Desa Kerta Buana menunjukkan adanya kesadaran untuk memposisikan seluruh krama secara setara tanpa membedakan berdasarkan Warna, Wangsa, atau Kasta. Khususnya di Desa Kerta Buana, telah mengalami proses transformasi yang signifikan dari sistem yang kaku dan hierarkis menjadi sistem yang lebih fleksibel, inklusif, dan adaptif. Faktor pendidikan, penyebaran ajaran agama, serta dinamika sosial budaya lokal berperan penting dalam proses ini.

2. Transformasi kekuasaan dalam sistem kasta Hindu Bali mempengaruhi struktur sosial masyarakat Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang:

Di Desa Kerta Buana telah mengalami transformasi kekuasaan dalam sistem kasta Hindu Bali yang membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Dalam aspek upacara keagamaan, pemilihan pemimpin kini lebih mengedepankan

kemampuan dan dedikasi, sementara dalam pernikahan, masyarakat semakin menerima pernikahan lintas kasta dengan menitikberatkan pada keharmonisan keluarga. Di bidang jabatan dan pekerjaan, kesempatan terbuka bagi siapa saja yang kompeten tanpa diskriminasi kasta. Meski sistem kasta masih memengaruhi struktur sosial, Desa Kerta Buana menunjukkan bahwa fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan sosial mampu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan egaliter, sekaligus tetap menjaga tradisi dan identitas budaya sebagai landasan kehidupan bersama.

3. Kesetaraan sosial antar kasta dalam sistem kasta Hindu Bali di Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang:

Jadi, meskipun kontroversi dan tantangan sistem kasta masih ada, transformasi menuju kesetaraan sosial telah berjalan dengan baik, terutama melalui akses pendidikan dan peluang kerja yang merata. Stratifikasi sosial dalam sistem kasta tidak lagi menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Desa Kerta Buana menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat mengelola tradisi dan nilai agama Hindu Bali sekaligus mendorong kemajuan sosial yang inklusif dan harmonis

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2002). Tantangan pembangunan Ekonomi Dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya. *Humaniora*, XIV(3), 260–270.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *CV. Syakir Media* (1st ed., Vol. 5, Issue January). Syakir Media Press.
- Achmad Rosidi; Asnawati; Ubaidillah; Kustini, N. M. N. R. U. R. S. U. W. S. Z. E. (2017). *Dimensi Tradisional dan Spiritual Agama Hindu* (I. N. Y. Segara (ed.); Pertama).
- Alit Septiari, D. M., & Widya Dhammayanti, I. G. A. (2023). Eksistensi Perempuan Bali Dalam Budaya Patriarki. *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian*, 3(2), 129. <https://doi.org/10.55115/jp.v3i2.3775>
- Asih, N. L. S., Suryaningsi, S., & Mustangin, M. (2023). Upacara Metatah Massal dalam Upaya Membantu Keluarga yang Tidak Mampu Melaksanakan Ajaran Agama di Desa Kerta Bhiana Kecamatan Tenggarong Seberang. *ASKARA : Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 09(January), 219–230. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/view/1579>
- Cahyadi, P. P. (2018). *Menggugat Kasta: Politik Pemakaian Kasta di Bali 1942-1960-an*.10,i–131. <https://www.researchgate.net/publication/337532839%0A>
- Cahyawati, I., & Muqowim, M. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 19(2), 210–220. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19\(2\).8338](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19(2).8338)
- Desky, A. F. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Hindu Bali Berbasis Kearifan Lokal di Kampung Bali Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i1.11063>
- Fahrurrozhi, A., & Kurnia, H. (2024). Memahami Kekayaan Budaya dan Tradisi Suku Bali di Pulau Dewata yang Menakjubkan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 2(1), 39–50. <https://doi.org/10.61476/6635j851>
- Farhaeni, M., & Martini, S. (2023). Pentingnya Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Dalam Mempertahankan Warisan Budaya Lokal Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3483>
- Fattah Nasution, A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI
- Galuh Pitaloka, P., Salma, T., Kamilah, P., Dharmawan, N. D., Zaki, A., & Winanti, A. (2024). *Hubungan Kasta Dengan Status Sosial Masyarakat Adat Bali*. 3.

- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2020). Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 91–102.
- I Made Purana. (2022). Study Of Critical Disadvantages System Catur Varna To Concept Catur Kasta In Civil Society Bali Hindu. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 5(1), 20–27. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v5i1.1524>
- Jenks, C. (1993). *Culture (Konsep Budaya)* (N. Kurnia (ed.)). <https://kalamkoppi.files.wordpress.com/2017/04/chris-jenks-culture-konsep-budaya.pdf>
- Masari, N. K., Sukerno, E., Wijaya, W. A., Juniardika, I. W., & Mustika, E. (2023). Sistem Kasta Dalam Agama Hindu Dan Implikasinya Terhadap Mobilitas Sosial Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 317–324.
- Maulana, I. P. A. P., & Dharma Putra, I. B. G. (2021). Metafora Konseptual Kasta Dalam Masyarakat Bali: Kajian Linguistik Kognitif. *Prasi*, 16(02), 92. <https://doi.org/10.23887/prasi.v16i02.37578>
- Ngabalin, M. (2015). Kajian Teologi Sosial Terhadap Praktek Pelaksanaan Kasta di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara. *Kenosis*, 1(2), 148–163.
- Nursapiyah. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); Pertama). Wal Ashri.
- Rambu Amma, E. S., Meyners, D. Y., & Ratu Udu, H. (2023). Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat Di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 645–654. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.629>
- Syah, R. H. (2015). Stratifikasi Sosial Dan Kesadaran Kelas. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2239>
- Widana, I. G. K., & Suksma, I. G. W. (2021). Perubahan Sistem Warna Menjadi Wangsa, Labeling Kasta Pada Masyarakat Bali. *Widyanaty*, 3(2), 61–73.
- Zendrato, Y. (2023). Kekuasaan Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 11932–11943